ANALISIS PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL ANTARA BANK DAN PENGUSAHA

Marindowati

ABSTRAK

Kegiatan usaha yang umum dilakukan oleh bank dalam menanamkan modal yang dikelolanya, meliputi bermacam-macam jenis antara lain pemberian kredit. Penanaman modal dalam bentuk pemberian kredit merupakan kegiatan utama dari suatu bank, karena sebagian besar pendapatan bank berasal dari bunga kredit. Pemberian fasilitas kredit oleh bank akan membantu pengusaha dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Perjanjian Kredit, Usaha Kecil*

A. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional, sebagian besar diarahkan pada pembangunan ekonomi. Faktor pendukung yang sangat penting untuk melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi adalah tersedianya dana atau modal yang cukup. Dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber, antara lain dari perbankan. Salah satu sumber dana bank berasal dari masyarakat, yang berbentuk simpanan giro, deposito dan tabungan. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian dana yang ada pada bank merupakan titipan dari masyarakat dan pada waktunya dikembalikan kepada pemiliknya.

Bank sebagai suatu badan usaha mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan untuk memperoleh keuntungan tersebut bank melakukan beberapa kegiatan yaitu pengerahan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang umum dilakukan oleh bank dalam menanamkan modal yang dikelolanya, meliputi bermacam-macam jenis antara lain pemberian kredit. Penanaman modal dalam bentuk pemberian kredit merupakan kegiatan utama dari suatu bank, karena sebagian besar pendapatan bank berasal dari bunga kredit. Pemberian fasilitas kredit oleh bank akan

membantu pengusaha dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat suatu hubungan timbal balik antara bank dan pengusaha. Pengusaha membutuhkan dana untuk meningkatkan usahanya dan bank memberikan dana yang dibutuhkan dalam bentuk fasilitas kredit bagi pengusaha. Dengan pemberian kredit oleh bank, diharapkan pengusaha menjadi maju dalam menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan yang diperhitungkan.

Dengan demikian antara bank dan pengusaha terikat dalam suatu perjanjian yang harus dilaksanakan antara kedua belah pihak. Dengan terikat dalam suatu perjanjian maka terjadilah hubungan hukum antara bank dan pengusaha. Bank mempunyai hak untuk menuntut pembayaran bunga atas kredit yang diberikan kepada pengusaha, sedangkan pengusaha mempunyai kewajiban untuk membayar bunga kredit. Hubungan hukum antara bank dan pengusaha diwujudkan secara tertulis dalam bentuk akad perjanjian kredit.

Penelitian ini hendak mempermasalahkan bagaimanakah proses pemberian kredit terhadap usaha kecil oleh bank dilakukan, apa syarat serta akibat hukumnya terhadap masing-masing pihak. Pendekatan dilakukan secara yuridis normatif, data bersumberkan pada data skunder, analisis dilakukan secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian bank

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menegaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank mendapatkan kepercayaan untuk menghimpunkan dana masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan jasa perbankan lainnya.¹

Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit Bank

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi *Credere* yang artinya percaya, sehingga dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dari pemberi kredit (bank) bahwa penerima kredit akan menggunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Ada 4 (empat) unsur dalam pengertian kredit:

- a. kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang;
- b. tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- c. risiko, yaitu akibat yang akan dihadapi selama perjanjian berlangsung dan apabila kontra prestasi tidak dipenuhi;
- d. prestasi atau objek kredit itu tidak saja dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Tetapi dalam kehidupan modern sekarang ini transaksi kredit hanya menyangkut uang.

Perjanjian kredit bank memiliki identitas tersendiri yang lain daripada perjanjian pinjam meminjam uang menurut Bab XIII Buku IIKUHPdt. Khususnya dari perjanjian kredit bank adalah:²

Perjanjian kredit bank hanya mengatur perjanjian pinjam uang.

- a. perjanjian kredit bank terjadi antara nasabah dan bank;
- b. pada perjanjian kredit bank ditetapkan jangka waktu tertentu dan besarnya bunga menurut perjanjian antara bank dengan nasabah.

Dengan demikian perjanjian kredit bank adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman yang ditentukan jangka waktu, bunga dan tujuan penggunaan kreditnya.

Proses Terjadinya Perjanjian Kredit

Facilitas kredit yang disediakan perbankan sangat membantu pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Untuk memperoleh bantuan modal berupa kredit perbankan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank yang bersangkutan. Ketentuan tersebut diantaranya mengenai syarat dan prosedur untuk memperoleh kredit bank.

Adapun syarat tersebut terbagi dalam dua syarat yaitu:

Syarat Umum:

- a. karakter calon debitur harus baik, status hukum berusia 21 tahun, sehat dan usaha tidak dalam keadaan pailit bahkan dinilai mempunyai prospek usaha yang baik dimasa yang akan datang;
- b. Kemampuan membayar dapat dibuktikan dari aktifitas usaha dan pemenuhan kemampuan finansial.

Syarat Khusus:

- a. total asset maksimal Rp.600 juta;
- b. maksimum pemberian kredit Rp.25 juta;
- c. usaha tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dibuktikan dengan surat izin usaha antara lain SIUP, TDP, SITU dan NPWP;

¹ Yan Sumarya, 1992: hlm. 6.

² Mariam Darus Badruzaman, 1991 *Perjanjian Kredit Bank*. PT.Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 179.

- d. laporan keuangan dilakukan minimal tiga tahun terakhir;
- e. agunan/jaminan baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang disertai asli tanda bukti kepemilikan.

Prosedur pemberian kredit usaha kecil oleh bank, melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. permohonan kredit, pihak bank menawarkan sendiri ke nasabah yang usahanya bagus atau nasabah datang langsung ke bank bagian kredit untuk mengajukan permohonan kredit. Permohonan itu dibuat secara tertulis dengan melampirkan syarat umum dan khusus. Surat permohonan itu didaftarkan kebagian Administrasi Kredit kemudian diserahkan pada *Marketing Landing Officer* (MLO), lalu diserahkan pada *Account Officer* (AO);
- b. investigasi kredit, dilakukan oleh *Account Officer* dengan mensurvei langsung calon debitur mengenai pribadi debitur, meninjau prospek dan lokasi usaha calon debitur, memeriksa jaminan yang akan diberikan, nasabah mengisi formulir permohonan kredit;
- c. analisis kredit, dalam hal ini bank memberlakukan prinsip 5 C untuk penentuan permohonan dikabulkan atau ditolak.

Prinsip 5 C tersebut, adalah:

- a. *Charakter* (watak/kepribadian): nasabah, moral dan kejujuran calon debitur sangat diutamakan untuk ukuran menentukan itikad baik calon debitur. Hal ini menyangkut sampai sejauh mana kebenaran dari keterangan-keterangan yang diberikan calon debitur terhadap data-data yang diminta bank.
- b. *Capital* (modal); modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia sebelum ada fasilitas kredit merupakan bahan pertimbangan apakah usaha itu akan berjalan lancar atau tidak.
- c. *Capacity* (kesanggupan/kemampuan): pada analisis ini bank berusaha mengetahui kemampuan manajemen operasionalnya sehingga dapat memenuhi segala kewajiban secara rutin dan pada saat jatuh tempo;
- d. *Collateral* (jaminan/agunan): dengan adanya jaminan, bank dapat memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada saat yang telah ditentukan.
- e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi), kondisi ekonomi pada sektor usaha calon

debitur dan kondisi ekonomi secara umum dalam perusahaan calon debitur itu berada.

Dari analisis kredit, pihak bank dalam hal ini *Account Officer* akan memutuskan apakah permohonan itu akan diterima atau tidak. Jika permohonan diterima proses akan dilanjutkan kepada *Marketing Landing Officer* (MLO).

Persetujuan dan Penandatanganan Kredit

Apabila permohonan diterima maka dibuatlah paket kredit yang merupakan hasil keputusan MLO dan Pimpinan Bank. Kemudian paket kredit tersebut diserahkan pada administrasi kredit. Administrasi kredit akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada debitur menyangkut besarnya pinjaman dan kewajibannya. Kemudian surat itu ditandatangani oleh debitur untuk diserahkan kembali kepada pihak bank. Pada akhirnya pihak bank menyiapkan dokumen perjanjian kredit yang berupa Surat Persetujuan Pinjam Uang (SPPU).

Pencairan kredit

Setelah penandatanganan surat persetujuan pinjam uang, maka administrasi kredit akan menerbitkan instruksi realisasi kredit (IRK). Setelah IRK terbit maka disiapkanlah alat pencairan kredit. Pencairan kredit biasanya berupa kuitansi pencairan kredit, yang akan menjadi bukti pembukuan.

Perjanjian Kredit Usaha Kecil antara Bank dan Pengusaha

Perjanjian kredit yang dipergunakan dalam pemberian kredit usaha kecil adalah Surat Persetujuan Pinjam Uang (SPPU). SPPU mengikuti bentuk perjanjian pada umumnya yang pada dasarnya memuat empat bagian:

- a. bagian pertama yaitu bagian awal/kepala yang memuat judul SPPU dan saat para pihak membuat perjanjian;
- b. bagian kedua adalah bagian komparasi SPPU yaitu bagian dari suatu akta yang memuat nama, pekerjaan, alamat bank dan debitur. Dasar hukum yang memberikan kewenangan yuridis untuk bertindak dari pihak, siapa yang memberi kuasa atau siapa yang diwakili pihak

- yang bersangkutan serta kedudukan para pihak;
- c. bagian ketiga adalah bagian perjanjian yang memuat persetujuan pendahuluan, kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian kredit;
- d. bagian ke empat dari SPPU yaitu bagian isi perjanjian yang memuat klausula-klausula yang diperjanjikan. Dan memuat tempat dan saat penandatanganan persetujuan pinjaman oleh pihak bank dan debitur.

Akibat Hukum Perjanjian Kredit

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kredit usaha kecil adalah perjanjian timbal balik antara debitur dan bank, perjanjian mana mengandung hak dan kewajiban antara debitur dan bank. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah bank berkewajiban menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepada debitur pada waktu yang telah ditentukan dan berhak menerima pembayaran kredit beserta bunga dari debitur sejumlah yang telah diperjanjikan. Debitur berkewajiban mentaati ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh bank sebagai pemberi kredit, misalnya menyerahkan barang jaminan. Debitur berhak untuk menerima sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berakhirnya perjanjian kredit usaha kecil

Perjanjian kredit usaha kecil dapat berakhir secara normal atau sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan dapat pula berakhir dengan tidak normal. Berakhirnya perjanjian kredit usaha kecil dikatakan normal apabila kewajiban-kewajiban debitur telah dipenuhi sebagaimana mestinya menurut perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan perjanjian dikatakan berakhir tidak normal, apabila salah satu pihak wanprestasi. Apabila salah satu pihak, bank atau debitur tidak melakukan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah mereka buat, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi.

Wanprestasi seorang dalam perjanjian dapat berupa:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

- b. melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat hukum jika debitur wanprestasi adalah:

- a. debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh bank sebagai kreditur;
- b. bank dapat menuntut/pemutusan perjanjian melalui hakim apabila perikatan itu timbal balik;
- c. beralihnya risiko (apabila perikatan itu tidak memberikan sesuatu);
- d. debitur diwajibkan membayar biaya perkara apabila samapai diperkarakan di muka pengadilan.

Khusus dalam perjanjian kredit usaha kecil berakhirnya perjanjian karena berakhirnya suatu ketetapan waktu (*termijn*) dalam suatu perjanjian, misal waktu yang diperjanjikan tiga bulan, enam bulan atau 12 bulan, maka bila waktu yang ditetapkan telah tiba (*jatuh tempo*) maka berakhirilah perjanjian tersebut kecuali ada perjanjian baru.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. syarat dan prosedur perjanjian kredit haruslah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini seperti yang diatur dalam KUHPdt mengenai perjanjian kredit dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK/1993 perihal Kredit Usaha Kecil;
- b. akibat hukum dari perjanjian kredit usaha kecil, menimbulkan hubungan hukum antara bank dan debitur yang mengandung hak dan kewajiban diantara mereka. Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik yang telah tertera dalam naskah perjanjian dalam bentuk Surat Persetujuan Pinjam Uang. Naskah perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku antara bank dan nasabah;
- c. berakhirnya perjanjian disebabkan berakhirnya suatu ketetapan waktu (*termijn*) dalam suatu perjanjian kredit usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. PT.Citra Aditya Bakti Bandung.
- Hadiwijaya dan Rivai Wirasasmita. 1990. *Analisis Kredit*. Pioner Jaya, Bandung.
- Suyatno, Thomas dan H.A.Chalik. 1991. *Dasar-Dasar Perkreditan*. PT.Gramedia dan STIE Perbanas. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.26/1/UKK/1993 tentang Kredit Usaha Kecil.